PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, PENGENDALIAN INTERNAL DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DENGAN KOMITMEN PROFESIONAL DAN KOMITMEN INDEPENDENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi

Oleh

Rahmatika M. Arsyad

21919053

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis

PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM,* PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DENGAN KOMITMEN PROFESIONAL DAN KOMITMEN INDEPENDENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Diajukan Oleh:
Rahmatika M. Arsyad
21919053

Telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 4 Februari 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

RAHMATIKA M. ARSYAD

No. Mhs. : 21919053

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM, PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DENGAN KOMITMEN PROFESIONAL DAN KOMITMEN INDEPENDENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,

maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.	Ayu Chairina Laksmi,SE.,M.AppCom.,M.Res., Ph.D.,Ak.,CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh : Dosen

Pembimbing



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2025



Rahmatika M. Arsyad

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini.

Penelitian berjudul **"Pengaruh *Whistleblowing System,* Pengendalian Internal Dan *Good Governance* Terhadap Pencegahan Tindak Korupsi dengan Komitmen Profesional Dan Komitmen Independensi Sebagai Variabel Moderasi"** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu Tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Magister (S2) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan Tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan seorang muslim.
3. Terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof Fathul Wahid, ST, M.Sc, Ph.D., Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Bapak Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D, Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si.,

M.Com (IS)., Ph.D., CFrA dan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. atas segala fasilitas dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan lancar.

4. Bapak Prof. Jihan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing Tesis penulis yang telah membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberi masukan dan arahan kepada untuk dapat menyelesaikan Tesis dengan baik dan benar.
5. Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan pada penulisan tesis.
6. Seluruh jajaran dosen program studi Magister Akuntansi yang banyak memberikan pengetahuan pada penulis selama belajar di program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Muhamad Arsyad SE, M.Si. dan Suharti Palamai selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dorongan, semangat dan rasa tanggung jawab bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan semangat.
8. Sahabat-sahabat dan rekan kerja penulis yang selalu membantu dan memberi nasihat dalam penyelesaian tesis ini. Zahra, Adisty, Nadiya, Aprilia, Mega, Kaka Ani, Mba Firly, Mba Jasmine, dan Mba Erlen yang selalu memberi semangat kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Akuntansi UII 24 dan teman-teman konsentrasi Audit Forensik, terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya. Semoga sukses selalu menyertai kita semua.
10. Day 6. Park Sungjin, Young K, Kim Wonpil, dan Yoon Dowoon yang selalu memberikan hiburan dan menjadi *moodbooster* di saat penulis lelah, serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan Tesis ini

11. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Tesis ini yang tidak dapat diungkapkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya berlimpah bagi beliau-beliau yang tersebut di atas. Terselesaikannya Tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga Tesis ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Penulis



Rahmatika M. Arsyad

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
BERITA ACARA UJIAN TESIS ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
BAB II **8**
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS **8**
2.1 Landasan Teori 8
2.1.1 Prosocial Organizational Behavior Theory 8
2.1.2 Fraud Triangle Theory 9
2.2 Penelitian Terdahulu 10
2.3 Perumusan Hipotesis 14
2.3.1 Pencegahan Tindak Korupsi 14
2.3.*2 Whistleblowing System* 15
2.3.3 Pengendalian Internal 16
2.3.4 *Good Governance* 17
2.3.5 Komitmen Profesional 18

2.3.6 Komitmen Independensi 19
2.3 Kerangka Konseptual 21
BAB III 23
METODE PENELITIAN 23
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Objek Penelitian 23
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 23
3.3.1 Variabel Dependen 24
3.3.2 Variabel Independen 24
3.4 Metode Analisis Data 29
3.4.1 Statistik Deskriptif 30
3.4.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*) 30
3.4.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) 31
3.4.4 Pengujian Hipotesis 31
BAB IV 36
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 36
4.1 Analisis Deskriptif 36
4.1.1 Analisis Deskriptif Data 36
4.2 Analisis Model Pengukuran (Outer Model) 40
4.2.1 Uji Validitas 40
4.2.2 Uji Reliabilitas 44
4.3 Analisis Model Struktural (Inner Model) 45
4.3.1 Nilai R-Square 46
4.4 Pengujian Hipotesis 47
4.4.1 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Tindak Korupsi 47
4.4.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Korupsi 49
4.4.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap Pencegahan Tindak Korupsi 50
4.4.4 Pengaruh Komitmen Profesional Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Korupsi 52
4.4.5 Pengaruh Komitmen Independensi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Korupsi 53

BAB V 55
PENUTUP 55
5.1 Kesimpulan 55
5.2 Keterbatasan Penelitian 55
5.3 Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi DKI Jakarta Tahun 2021 - 2023 3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 11
Tabel 4. 1 Deskripsi Demografi Responden 36
Tabel 4. 2 Hasil Outer Loading 42
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas 45
Tabel 4. 4 Nilai R-Square 46
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Hipotesis 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 22
Gambar 4. 1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 61
Lampiran 2: Surat Permohonan Ijin Penelitian 71
Lampiran 3: Analisis Statistik Deskriptif 72
Lampiran 4: Hasil Outer Loading 73
Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas 75
Lampiran 6: Nilai R-Square 75
Lampiran 7: Pengujian Hipotesis 76

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance* terhadap pencegahan tindak korupsi, dengan komitmen profesional dan komitmen independensi sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada auditor dan pengawas di Inspektorat DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi sedangkan *whistleblowing system* dan *good governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi. Selain itu komitmen profesional dan komitmen independensi terbukti memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan tindak korupsi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penelitian selanjutnya, instansi pemerintah dan pengembangan kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: *Whistleblowing System,* Pengendalian Internal, *Good Governance,* Komitmen Profesional, Komitmen Independensi, dan Pencegahan Tindak Korupsi

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the whistleblowing system, internal control, and good governance on the prevention of corruption, with professional commitment and independence commitment as moderating variables. The method used is a quantitative approach with data collection through questionnaires distributed to auditors and supervisors at DKI Jakarta Inspectorate. The results of the study indicate that internal control has a positive and significant influence on the prevention of corruption, while the whistleblowing system and good governance do not have a significant influence on the prevention of corruption. In addition, professional commitment and independence commitment have been shown to strengthen the relationship between internal control and the prevention of corruption. These findings are expected to provide insight for further research, government agencies and the development of corruption prevention policies in Indonesia.

***Keywords**: Whistleblowing System, Internal Control, Good Governance, Professional Commitment, Independence Commitment, and Prevention of Corruption*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan niat untuk menipu pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok disebut sebagai *fraud*. Korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan dalam laporan keuangan merupakan tiga kategori utama penipuan menurut *fraud* Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2019). Bentuk-bentuk korupsi meliputi konflik kepentingan, suap, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi.

Di Indonesia, terdapat sejumlah kasus korupsi yang signifikan, terutama di sektor publik. Contohnya adalah kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 triliun, serta kasus E-KTP yang telah berlangsung sejak 2011 dengan total kerugian mencapai Rp 2,3 triliun, dan masih banyak kasus lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya berbagai masalah korupsi yang melanda Indonesia. Survei ACFE tahun 2022 mengungkapkan bahwa tindakan penipuan paling banyak didominasi oleh korupsi dengan persentase mencapai 64%.

Skema korupsi yang dilaporkan oleh ACFE teridentifikasi melalui informasi yang diterima dari tip (42%) dan saluran pengaduan yang berasal dari karyawan (39,9%). Saluran pengaduan karyawan ini dikenal dengan istilah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS). *Whistleblowing* merujuk pada pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak etis, atau tindakan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau

pimpinan organisasi kepada atasan atau lembaga lain yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Pelaporan mengenai terjadinya penipuan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti aplikasi, situs web, email, SMS, hingga telepon yang telah disediakan oleh masing-masing instansi.

Pihak yang melaporkan tindakan pelanggaran dikenal sebagai *whistleblower*. Terdapat dua kategori *whistleblower*, yaitu *whistleblower* internal yang berasal dari dalam suatu organisasi dan memiliki pengetahuan mengenai pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tersebut, serta *whistleblower* eksternal yang merupakan individu atau entitas dari luar organisasi yang mengetahui dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tersebut.

Whistleblowing system memiliki peran penting dalam pencegahan tindak korupsi, namun terdapat faktor lain yang juga memengaruhi, seperti pengendalian internal dan tata kelola yang baik. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan yang berhubungan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Pengendalian internal yang efektif sangat krusial untuk mengurangi risiko kecurangan. Penerapan pengendalian internal dapat melibatkan karyawan dalam memahami kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dan pelaporan kecurangan.

Tata kelola yang baik merujuk pada struktur dan proses dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas, kontrol, serta perilaku di tingkat manajemen puncak (Sholihun, 2021). Tata kelola ini menentukan corak perilaku etis dalam organisasi dan memainkan peran penting dalam pencegahan penipuan.

Interaksi antara sistem pelaporan pelanggaran, pengendalian internal, dan praktik tata kelola yang baik menciptakan suatu pendekatan menyeluruh untuk mencegah terjadinya kecurangan, termasuk upaya pencegahan korupsi.

Berdasarkan data pemetaan kasus korupsi tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kelima dalam hal kasus korupsi terendah di Indonesia. Terdapat delapan kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebesar delapan ratus enam puluh tujuh triliun rupiah. Dengan tingkat korupsi yang relatif rendah, peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi sejauh mana pelaksanaan audit dalam melaporkan pelanggaran yang berkaitan dengan pencegahan tindak korupsi di wilayah tersebut, serta peran pengendalian internal dan tata kelola yang baik dalam upaya pencegahan korupsi di daerah tersebut.

Tabel 1. 1

Pemetaan Kasus Korupsi DKI Jakarta Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap/Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
2021	8	1.203.945.562.472	-	1.700.000.000
2022	8	867.473.261.604	-	241.200.000.000
2023	10	1.419.984.665.138	-	-

Tabel di atas menunjukkan pemetaan kasus korupsi di DKI Jakarta dari tahun 2021 hingga 2023, yang mencakup jumlah kasus dan nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Pada tahun 2021, terdapat delapan kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp 1.203.945.562.472, sementara pada tahun 2022, jumlah kasus tetap sama, tetapi nilai kerugian mengalami penurunan menjadi Rp 867.473.261.604. Pada tahun 2023, jumlah

kasus meningkat menjadi sepuluh, dengan Rp 1.419.984.665.138. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus korupsi di DKI Jakarta relatif stabil dan relatif rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya, terdapat dapat fluktuasi dalam nilai kerugian yang mencerminkan dinamika kompleksitas permasalahan korupsi di wilayah tersebut. Penurunan nilai kerugian pada tahun 2022 dapat diindikasikan sebagai hasil dari upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih baik, meskipun tantangan masih tetap ada dengan peningkatan jumlah kasus pada tahun 2023. Hal ini menegaskan perlunya penguatan sistem pelaporan pelanggaran, pengendalian internal dan juga *good governance* untuk lebih efektif dalam mencegah tindak korupsi di DKI Jakarta.

Motivasi dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mungkin memengaruhi upaya pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Penelitian ini berlandaskan pada kemampuan auditor untuk bertindak secara profesional dan independen dalam berbagai situasi. Landasan tersebut tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mengandung aspek etis. Perilaku moral auditor sering kali menjadi sorotan, terutama terkait dengan berbagai kasus pelanggaran akuntansi yang melibatkan auditor. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan budaya etika organisasi, yang memiliki peran penting dalam membentuk cara karyawan beroperasi dan berperilaku, guna mendorong perilaku moral serta mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan tindak korupsi diantaranya penelitian Akhyaar *et al.*, (2022), Kuswati (2023), Mansor *et al.*, (2020), Rahmi *et al*., (2024), Wijaya (2020), Badrulhuda *et al.*, (2021), Farochi (2022), dan Okafor et al., (2020).

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian ini mengadopsi variabel sistem pelaporan (*whistleblowing system*), pengendalian internal, dan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan tindak korupsi. Selain itu, dalam penelitian ini, komitmen profesional dan komitmen independensi diperlakukan sebagai variabel moderasi yang menghubungkan pengendalian internal dengan pencegahan tindak korupsi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa komitmen profesional dan komitmen independensi dapat memengaruhi tindak korupsi, terutama jika sistem pelaporan diimplementasikan dengan efektif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dengan mengintegrasikan beberapa variabel kunci dalam konteks pencegahan tindak korupsi, yaitu *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance*, serta mempertimbangkan komitmen profesional dan komitmen independensi sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memfokuskan pada pengaruh langsung dari masing-masing variabel, studi ini mengeksplorasi interaksi antara variabel-variabel tersebut, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *whistleblowing system* berpengaruh pada pencegahan tindak korupsi?

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh pada pencegahan tindak korupsi?
3. Apakah *good governance* berpengaruh pada pencegahan tindak korupsi?
4. Apakah komitmen profesional memoderasi pengaruh pengendalian internal pada pencegahan tindak korupsi?
5. Apakah komitmen independensi memoderasi pengaruh pengendalian internal pada pencegahan tindak korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh penggunaan *whistleblowing system* terhadap pencegahan tindak korupsi.
2. Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan tindak korupsi.
3. Menguji pengaruh *good governance* terhadap pencegahan tindak korupsi.
4. Menguji komitmen profesional sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan tindak korupsi.
5. Menguji komitmen independensi sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan tindak korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis kepada semua pihak yang berhubungan terkait penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan mengenai pengaruh komitmen profesional dan komitmen independensi dalam penggunaan *whistleblowing system* terhadap pencegahan tindak korupsi dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu ekonomi terutama pada bagian akuntansi;

b. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *whistleblowing system* dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi instansi lembaga pemerintahan untuk memperbaiki sistem yang ada di pemerintahan terutama *whistleblowing system*.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk meningkatkan kualitas lembaga dalam hal penerapan *whistleblowing system* terkait pencegahan tindak korupsi.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Prosocial Organizational Behavior Theory

Brief & Motowidlo (1986) mendeskripsikan *prosocial organization behavior* sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang ditujukan kepada individu, kelompok, atau organisasi lain dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Teori perilaku organisasi prososial berfungsi sebagai landasan yang mendukung tindakan *whistleblowing*. Dalam konteks ini, seorang *whistleblower* dapat dipandang sebagai perilaku prososial yang berupaya membantu pihak lain dalam menegakkan integritas dan menyelamatkan organisasi atau perusahaan dari tindakan penyimpangan atau kecurangan.

Bentuk-bentuk atau perilaku prososial yang dijelaskan oleh Brief dan Motowidlo terdiri dari 13 jenis perilaku. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anggota organisasi merasa keberatan terhadap arahan, prosedur, atau kebijakan yang dianggap tidak etis, ilegal, dan berpotensi merugikan tujuan jangka panjang organisasi. Jika ia tidak dapat secara langsung menunjukkan atau mengubah hal tersebut, ia mungkin akan melakukan tindakan *whistleblowing* dengan melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang.

Whistleblowing system merupakan wujud nyata dari perilaku organisasi yang mendukung kepentingan sosial. Ketika seseorang melaporkan tindakan penipuan, mereka tidak hanya menjaga integritas organisasi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tindakan ini menunjukkan komitmen individu untuk bertindak demi kepentingan

bersama, meskipun terdapat risiko pribadi yang mungkin dihadapi. Dengan adanya sistem pelaporan yang efektif, individu merasa lebih terlindungi untuk melaporkan pelanggaran, yang pada gilirannya mendorong perilaku sosial yang positif dalam organisasi.

2.1.2 Fraud Triangle Theory

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel pengendalian internal dan *good governance* adalah teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) yang diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953. Dalam teorinya, Cressey mengidentifikasi tiga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu: (1) Tekanan (*unshareable pressure/incentive*), yang mencakup faktor-faktor seperti keserakahan, kondisi ekonomi, serta emosi individu seperti cemburu, gengsi, dan keinginan untuk membalas dendam; (2) Peluang (*perceived opportunity*), yang merujuk pada situasi yang dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan tindakan curang. Peluang ini sering kali muncul akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang oleh individu. Untuk mengurangi risiko kecurangan yang berasal dari peluang ini, penting untuk melakukan deteksi dini dan menerapkan kontrol yang efektif; (3) Rasionalisasi (*rationalization*), yaitu kondisi di mana pelaku kecurangan berusaha meyakinkan diri bahwa tindakan yang diambil adalah benar sebelum melakukan kecurangan. Upaya ini bertujuan agar perilaku ilegal yang dilakukan tetap dapat diterima, meskipun sebenarnya merupakan tindakan curang. Pembenaran ini biasanya dilakukan sebelum tindakan kecurangan terjadi, bukan setelahnya, dan sering kali dalam bentuk peminjaman aset yang dicuri untuk kepentingan orang lain yang disukai.

Dalam penelitian ini, tekanan dapat diartikan sebagai faktor-faktor eksternal yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi, seperti desakan dari atasan,

kebutuhan ekonomi, atau ambisi pribadi. Variabel seperti pengendalian internal berperan penting dalam mengurangi tekanan tersebut dengan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan mengurangi dorongan untuk melakukan kecurangan.

Peluang terjadinya kecurangan dapat muncul akibat adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal atau minimnya pengawasan. Dalam konteks ini, *whistleblowing system* memiliki peranan yang sangat penting, karena sistem yang efektif dapat menyediakan saluran bagi individu untuk melaporkan tindakan kecurangan, sehingga mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Di samping itu, penerapan *good governance* juga berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Rasionalisasi merupakan suatu proses di mana individu yang melakukan kecurangan berusaha untuk membenarkan perilaku mereka. Dalam penelitian ini, komitmen profesional serta komitmen independensi auditor dapat berperan sebagai faktor yang memengaruhi cara individu merasionalisasi tindakan mereka. Auditor yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap etika profesi cenderung menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap pelaporan pelanggaran, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk merasionalisasi tindakan korupsi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan sebagai referensi dan analisis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1	Riyanto & Arifin (2022)	Variabel Independen: *Whistleblowing system* Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	*Whistleblowing System* memiliki peran penting dalam pencegahan fraud dalam suatu instansi
2	Rahmi *et al* (2024)	Variabel Independen: Independensi Auditor *Whistleblowing System* Variabel Dependen: Kemampuan mendeteksi kecurangan	Sikap independensi auditor internal dan penerapan *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan
3	Dinia & Rosyid (2022)	Variabel Independen: *Whistleblowing System* Lingkungan pengendalian Variabel Dependen: Pencegahan Korupsi Variabel Moderasi Perilaku Etis	*Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan Perilaku etis tidak mampu memoderasi hubungan tersebut
4	Akhyaar *et al.*, (2022)	Variabel Independen: Pengendalian Internal *Whistleblowing System*	*Whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud Sistem pengendalian internal tidak

		Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud yang disebabkan oleh kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian internal
5	Kuswati (2023)	Variabel Independen: Pengendalian Internal *Whistleblowing System* Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan Akuntansi	Pengendalian internal memberikan pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi *Whistleblowing system* memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.
6	Farochi (2022)	Variabel Independen: Pengendalian Internal Good Corporate Governance Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
7	Malik & Abdulajid (2023)	Variabel Independen: Prinsip *Good Governance* Variabel Dependen: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Pentingnya penerapan *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintah
8	Hakim (2022)	Variabel Independen: *Good Governance* Variabel Dependen:	Penelitian ini menekankan bahwa untuk mencapai *good governance* dan mencegah korupsi, diperlukan sinergi antara

		Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta penerapan prinsip-prinsip AAUPB secara konsisten
9	Purba & Huda (2022)	Variabel Independen: *Good Governance* Variabel Dependen: Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Penerapan prinsip *good governance* sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif
10	Mansor *et al.*, 2020)	Variabel Independen: Independence Commitment Professional Commitment Variabel Dependen: *Internal Whistleblowing Intention*	Komitmen profesional dan komitmen independensi secara positif mempengaruhi niat *whistleblowing* auditor internal
11	Dewi & Dewi (2019)	Variabel Independen: Profesionalisme Komitmen Organisasi Sensitivitas Etika Variabel Dependen: Intensi dalam Melakukan *Whistleblowing*	Variabel profesionalisme, komitmen organisasi, dan sensitivitas etika memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi dalam melakukan *whistleblowing*
12	Wijaya (2020)	Variabel Independen: Profesionalisme	Profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

		Independensi Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan Variabel Moderasi: Iklim Etika-Egoisme	Independensi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan Iklim etika-egoisme dapat memperkuat hubungan antara profesionalisme dan independensi terhadap pencegahan kecurangan
13	Badrulhuda *et al.*, (2021)	Variabel Independen: Komitmen Profesional Sensitivitas Etis Variabel Dependen: Intensi *whistleblowing*	Auditor dengan komitmen profesional yang tinggi dan sensitivitas etis yang baik lebih cenderung untuk melaporkan pelanggaran

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pencegahan Tindak Korupsi

Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor pemerintahan (*misuse of public office*) untuk kepentingan pribadi, yang mencakup tindakan seperti penjualan aset negara secara ilegal oleh pejabat, pengembalian dana dalam proses pengadaan pemerintah, penyuapan, serta penggelapan dana-dana publik (Tuanakotta, 2019). Terdapat empat kategori korupsi, yaitu: (a) konflik kepentingan, yang terjadi ketika seorang pegawai memiliki kepentingan pribadi dalam suatu transaksi yang dapat merugikan perusahaan. (b) Suap, yang meliputi pemberian, penawaran, atau penerimaan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. (c) Pemberian ilegal, yang mirip dengan suap tetapi tidak bertujuan

untuk mempengaruhi keputusan, melainkan hanya sekadar permainan dari pelaku. (d) Pemerasan ekonomi, di mana penjual menawarkan suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaannya.

2.3.*2 Whistleblowing System*

Sistem pelaporan pelanggaran, atau yang dikenal sebagai *whistleblowing system*, adalah suatu layanan yang memungkinkan karyawan maupun pihak luar untuk mengajukan pengaduan terkait pelanggaran atau perilaku tidak etis yang terjadi di tempat kerja (Lee, 2018).

Menurut Shawver (2018), pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) didefinisikan sebagai tindakan seseorang dalam suatu institusi yang mengungkapkan adanya tindakan ilegal, amoral, atau tidak sah yang diperintahkan oleh atasan kepada staf, yang mengakibatkan tindakan yang berbeda dari staf tersebut. Seorang *whistleblower* akan melaporkan kecurangan melalui saluran yang tepat dan kepada pihak berwenang yang memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan perbaikan.

Berdasarkan *prosocial organizational behavior theory,* tindakan pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing* dipandang sebagai perilaku sosial yang konstruktif, karena dapat menghentikan dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan demi memberikan manfaat bagi individu dalam institusi tersebut. Dalam implementasinya, sistem pelaporan pelanggaran berkaitan erat dengan upaya pencegahan korupsi. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai atau pihak terkait dalam melakukan *whistleblowing*, maka semakin efektif pula upaya untuk menekan dan mencegah korupsi. Dalam konteks ini, individu yang berperan sebagai *whistleblower* tidak hanya menjaga integritas organisasi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih etis dan transparan. Tindakan ini mencerminkan

komitmen individu untuk bertindak demi kepentingan bersama, sejalan dengan tujuan pencegahan tindak korupsi. Teori ini didukung oleh penelitian Hakim *et al*., (2017), Marliza (2018), Endarningtyas & Chariri (2022), Pramudyastuti *et al*., (2021), Paramitha (2017), Wardah *et al.*, (2022), dan Islamiyah *et al*., (2020).

H_1: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak korupsi.

2.3.3 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam merencanakan dan mengawasi aktivitas di dalam suatu entitas, dengan tujuan untuk merumuskan strategi serta mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Larasati *et al*., 2017). Fungsi pengendalian internal sangat krusial dalam mencegah dan mendeteksi tindakan penipuan serta untuk melindungi aset organisasi, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa kelemahan dalam pengendalian internal dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Ketidakcukupan dalam pengendalian internal dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan tindakan curang. Sebaliknya, pengendalian internal yang efektif berperan penting dalam mengurangi kemungkinan kecurangan dengan membangun struktur dan prosedur yang ketat dalam suatu organisasi. Apabila pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat mengurangi peluang individu untuk melakukan kecurangan, berkat adanya pengawasan yang memadai dan mekanisme deteksi yang cepat. Selain itu, pengendalian internal yang kuat juga dapat mengurangi tekanan yang mungkin dirasakan individu untuk berbuat curang, dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Teori ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Kurniawan (2019), Damayanti (2021), Farochi (2022), Jannah (2016) dan Nugroho (2022).

H_2: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak korupsi

2.3.4 *Good Governance*

Good Governance adalah sekumpulan norma yang mengatur hubungan antara pemegang saham, kreditur, manajemen, karyawan, pemerintah, serta para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Damayanti, 2021). Teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi ketika terdapat tekanan yang signifikan, kesempatan yang ada, dan didukung oleh individu yang memiliki integritas rendah. Penerapan prinsip *good governance* sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan, khususnya dalam konteks tindak korupsi.

Pencegahan korupsi dalam suatu organisasi dapat dicapai melalui penerapan prinsip *good governance* di perusahaan. *Good governance* berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, serta menjamin adanya pengawasan yang efektif terhadap seluruh aktivitas organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, anggota organisasi akan lebih terdorong untuk berperilaku etis, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan yang tidak jujur.

Teori *Fraud Triangle* menyatakan bahwa kecurangan terjadi ketika Teori ini didukung oleh sejumlah penelitian, termasuk penelitian Jannah (2016), Kurniawan (2019), Damayanti (2021), Ulum (2022), dan Hambali *et al*., (2023)

H_3: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak korupsi

2.3.5 Komitmen Profesional

Profesionalisme dapat dipahami sebagai ikatan yang erat antara individu dan profesinya. *Whistleblowing* dapat terjadi apabila terdapat lingkungan organisasi yang kondusif. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang baik, diperlukan komitmen profesional yang tinggi dari para karyawan. Menurut Kusumastuti (2022), individu yang memiliki komitmen yang kuat terhadap profesinya akan menganggap pencapaian tujuan sebagai hal yang penting, sedangkan mereka yang memiliki komitmen profesional yang rendah cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi.

Fraud Triangle Theory menjelaskan bahwa kecurangan muncul dari adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tingginya komitmen profesional pada individu, khususnya auditor atau karyawan yang memegang tanggung jawab etis, dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan dengan mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan kode etik profesi dan norma yang ada. Individu yang memiliki komitmen profesional yang kuat cenderung lebih mampu menolak tekanan untuk melakukan tindakan curang dan lebih sulit untuk merasionalisasi perilaku yang tidak etis.

Dalam kerangka ini, pengendalian internal berfungsi untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan dengan menciptakan sistem dan prosedur yang ketat, serta pengawasan yang efektif. Namun, efektivitas pengendalian internal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat komitmen profesional individu. Ketika individu, seperti auditor atau karyawan, memiliki komitmen profesional yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk mematuhi prosedur pengendalian internal dan melaporkan pelanggaran yang mereka temui.

Sebaliknya, jika komitmen profesional rendah, individu mungkin lebih rentan terhadap tekanan untuk melakukan tindakan curang, serta lebih mudah merasionalisasi perilaku tidak etis. Dalam hal ini, komitmen profesional bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa komitmen profesional memiliki pengaruh positif terhadap tindak korupsi diantaranya Sukesi (2017), Dewi (2019), Hailah *et al*., (2021), dan Chairi *et al*., (2022). Berbeda dengan penelitian Badrulhuda *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap *whistleblowing.*

H_4: Komitmen profesional memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan tindak korupsi

2.3.6 Komitmen Independensi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mansor *et al*., (2020), komitmen terhadap independensi diartikan sebagai sejauh mana seorang akuntan menganggap independensi auditor sebagai salah satu atribut paling penting dalam profesinya. Mereka juga meyakini bahwa standar regulasi independensi auditor harus diterapkan secara ketat dan relevan dalam konteks akuntan publik. Prinsip etika yang mendasari independensi auditor berlandaskan pada kode etik dari organisasi profesi serta kewajiban auditor untuk melaporkan setiap kesalahan dan tindakan yang mencurigakan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini yang independen mengenai keandalan laporan keuangan klien. Dalam situasi ini, auditor diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesional dan mengikuti pedoman yang ada ketika menghadapi dilema etika.

Fraud Triangle Theory digunakan untuk menjelaskan variabel komitmen independensi dimana individu yang memiliki komitmen independensi yang tinggi, seperti auditor, cenderung lebih mampu menolak tekanan eksternal yang mungkin mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan curang. Selain itu, komitmen independensi yang kuat juga dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, karena individu tersebut akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih cenderung untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui.

Pengendalian internal berfungsi untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan dengan menciptakan sistem dan prosedur yang ketat, serta pengawasan yang efektif. Namun, efektivitas pengendalian internal ini juga dapat dipengaruhi oleh tingkat komitmen independensi individu, terutama dalam konteks auditor atau karyawan yang memiliki tanggung jawab etis. Ketika individu memiliki komitmen independensi yang tinggi, mereka cenderung lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal yang mungkin mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan curang. Sebaliknya, jika komitmen independensi rendah, individu mungkin lebih rentan terhadap tekanan untuk melakukan tindakan curang dan lebih mudah merasionalisasi perilaku tidak etis. Dalam hal ini, komitmen independensi bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indria *et al*., (2015) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap tindakan korupsi. beberapa penelitian lain menyimpulkan bahwa komitmen terhadap independensi justru memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan korupsi, seperti yang diungkapkan oleh Peuranda *et al.* (2019), Pramudyastuti *et al*., (2021), dan Wijaya (2020).

H_5: Komitmen independensi memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan tindak korupsi

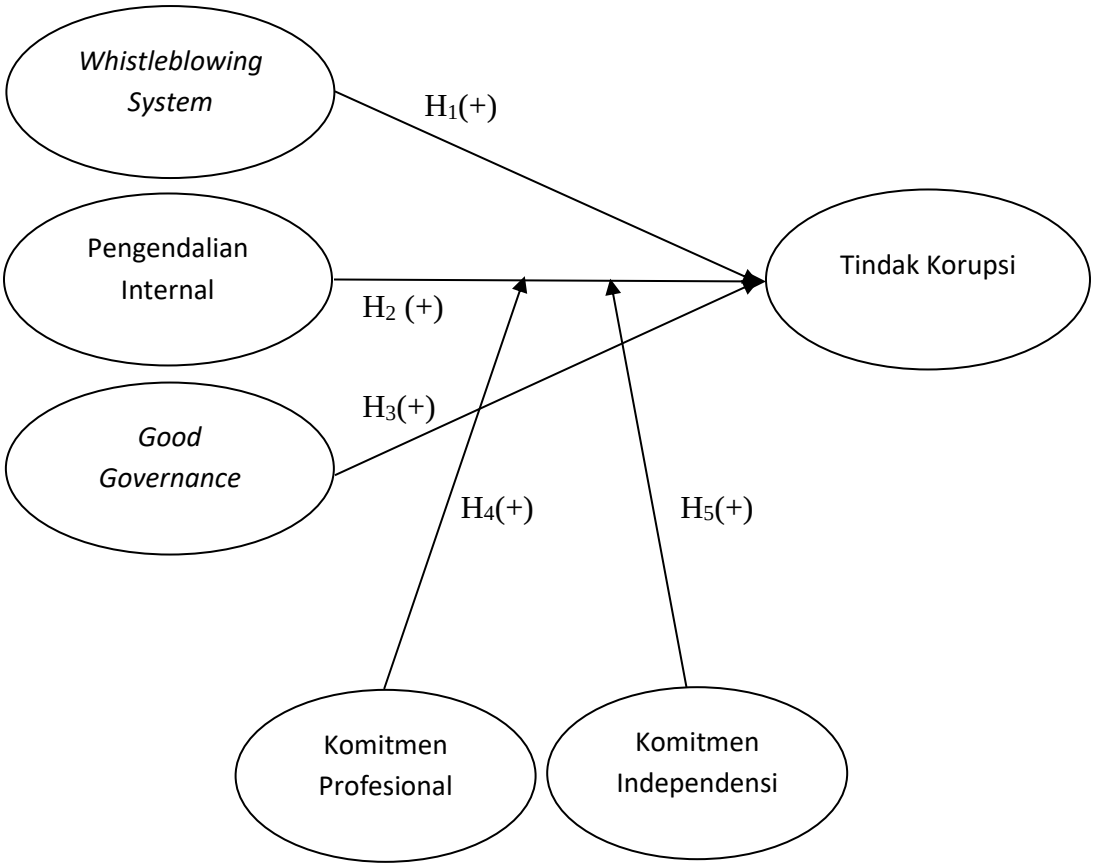
2.3 Kerangka Konseptual

Dasar pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan tindakan korupsi. Kerangka konseptual yang diusulkan menunjukkan bahwa sistem pelaporan, pengendalian internal, dan tata kelola yang baik memiliki pengaruh positif terhadap upaya pencegahan korupsi. Di samping itu, komitmen profesional dan komitmen independensi berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau mengurangi hubungan antara pengendalian internal dengan pencegahan tindak korupsi tersebut.

Dasar pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang relevan, antara lain: (1) Pencegahan tindak korupsi ditetapkan sebagai variabel dependen karena merupakan isu utama yang ingin diatasi dalam studi ini, (2) Sistem pelaporan (*whistleblowing system*) dipilih karena memiliki peran krusial dalam menyediakan saluran bagi individu untuk melaporkan tindakan kecurangan, (3) Pengendalian internal dipilih karena berfungsi penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, (4) *Good Governance* dipilih karena praktik tata kelola yang baik dapat menciptakan lingkungan yang transparan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Selain itu, variabel moderasi (5) Komitmen profesional dipilih karena sikap profesional auditor dapat memengaruhi efektivitas sistem pelaporan dalam mencegah tindak korupsi, (6) Komitmen independen dipilih karena independensi auditor dianggap sangat penting dalam menjaga integritas dan objektivitas dalam proses audit. Penelitian

ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak korupsi.

Gambar kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini menggambarkan hubungan-hubungan tersebut secara visual, menunjukkan bagaimana masing-masing variabel saling berinteraksi dalam konteks pencegahan tindak korupsi.



Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausal-komparatif. Penelitian ini memanfaatkan survei yang dapat menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian. Metode survei yang digunakan adalah kuesioner atau pernyataan yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data dan informasi untuk mendapatkan data dari sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi.

3.2 Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pegawai yang bekerja di Kantor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta Kepulauan Seribu. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan untuk sampel penelitian adalah semua pegawai yang memiliki pengalaman sebagai auditor atau P2UPD (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah) dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2024. Pemilihan auditor inspektorat atau pemeriksa sebagai responden didasarkan pada peran penting mereka dalam penerapan dan pengembangan *whistleblowing*, pengendalian internal, serta *good governance,* khususnya di sektor publik. Pertimbangan ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Pramudyastuti *et al.*, (2021).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Penelitian ini mengangkat tema pencegahan tindakan korupsi sebagai variabel dependen. Tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak jujur yang dapat merugikan keuangan negara, serta mencakup penyelewengan atau penggelapan dana negara untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain (Asliani, 2022).

Pencegahan korupsi adalah suatu upaya yang terintegrasi untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan, mengurangi tekanan pada pegawai agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, serta menghilangkan alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan. Upaya pencegahan korupsi dievaluasi melalui empat indikator, yaitu (1) Monitoring, (2) Review, (3) Laporan, (4) Kejujuran. Variabel-variabel ini diukur menggunakan skala Likert 1-5, yang berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Metode pengukuran ini diadaptasi dari penelitian sebelumnya oleh Widyawati *et al*., (2019).

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 *Whistleblowing system*

Whistleblowing system adalah proses pengungkapan atau penyampaian informasi mengenai tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan berdampak pada kerugian negara atau masyarakat. Tujuan dari sistem ini adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi (Islamiyah *et al*., 2020). Sistem pelaporan pelanggaran berfungsi sebagai bagian dari pengendalian organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini meliputi (1) Aspek struktural; (2) Aspek operasional; dan (3) Aspek perawatan. Pengukuran

variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala *likert* 1-5, yang berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Metode pengukuran ini diadaptasi dari penelitian Wardah et al., (2022).

3.3.2.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai kepada manajemen bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Pengukuran pengendalian internal dilakukan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Widyawati *et al*., (2019) yang mencakup lima indikator, yaitu: (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Aktivitas pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; (5) Pemantauan pengendalian. Variabel ini diukur menggunakan skala *likert* dengan nilai 1-5, yang berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

3.3.2.3 *Good Governance*

Good Governance adalah pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi yang menekankan pentingnya struktur dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Penilaian *Good Governance* dilakukan dengan menggunakan metode yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya oleh Kurniawan & Izzaty (2019) yang mencakup lima indikator (1) Akuntabilitas; (2) Responsibilitas; (3) Transparansi; (4) Kewajaran dan (5) Independensi. Variabel diukur dengan menggunakan skala *likert* nilai 1-5 mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

3.3.2.4 Komitmen Profesional

Dalam profesi akuntan publik, komitmen profesional diartikan sebagai penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam profesi tersebut. Dalam penelitian ini, komitmen

profesional didefinisikan sebagai ketertarikan emosional individu terhadap profesinya, yang berlandaskan pada identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan profesi, serta keinginan untuk mendukung profesi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Untuk mengukur variabel komitmen profesional, terdapat 15 indikator yang diadaptasi dari instrumen yang dikembangkan dalam penelitian Darmawan (2021), yaitu:

1. Citra diri
2. Keterikatan emosional
3. Menghabiskan karir
4. Antusiasme
5. Bangga menjadi auditor
6. Merasa rugi
7. Pengorbanan pribadi
8. Kesulitan dalam beralih profesi
9. Terganggu jika beralih profesi
10. Menerima segala jenis pekerjaan
11. Menyetujui peraturan yang ada
12. Merasa bersalah
13. Memiliki loyalitas
14. Tanggung jawab moral
15. Suatu kewajiban.

Penelitian ini menggunakan pengukuran 5 nilai pada skala *likert*, yang mencakup rentang dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, dalam item pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Profesi sebagai auditor penting untuk citra diri saya
2. Saya memiliki keterikatan emosional dengan profesi auditor
3. Saya merasa bahagia jika dapat menghabiskan karir sebagai auditor
4. Saya antusias tentang profesi auditor
5. Saya bangga menjadi bagian dari profesi auditor
6. Saya merasa rugi jika beralih dari profesi auditor ke profesi lain
7. Mengubah profesi sekarang akan memerlukan pengorbanan pribadi yang besar
8. Beralih dari profesi auditor ke profesi lain merupakan suatu hal yang sulit saya lakukan pada saat ini
9. Banyak yang terganggu dalam kehidupan saya jika saya beralih dari profesi auditor ke profesi lain
10. Saya akan menerima semua jenis pekerjaan yang berkaitan dengan profesi auditor.
11. Saya tidak menemui kesulitan dalam menyepakati aturan-aturan yang ada dalam profesi auditor
12. Saya merasa bersalah jika meninggalkan atau keluar dari pekerjaan sebagai auditor.
13. Saya memiliki loyalitas pada profesi auditor sehingga saya tetap menekuni profesi auditor
14. Saya memiliki tanggung jawab moral untuk tetap berada pada profesi auditor
15. Saya meyakini bahwa bekerja sebagai auditor merupakan suatu kewajiban

3.3.2.5 Komitmen Independensi

Komitmen independensi dalam penelitian ini diartikan sebagai tanggung jawab profesional auditor yang berlandaskan pada prinsip etika, sesuai dengan kode etik yang berlaku bagi para profesional, serta kewajiban untuk melaporkan setiap kesalahan dan tindakan yang perlu dipertanyakan.

Pengukuran variabel komitmen independensi dilakukan dengan menggunakan 7 item, di antaranya adalah:

1. Bertindak independen
2. Konflik kepentingan
3. Fondasi utama
4. Keterlibatan
5. Bangga independen
6. Melawan tekanan
7. Kepentingan umum

Penelitian ini menerapkan pengukuran dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Metode pengukuran ini diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mansor *et al*., (2020) dan diterapkan pada item pertanyaan berikut:

1. Saya sangat senang dengan memiliki pekerjaan yang mengharuskan saya untuk bertindak independen
2. Saya selalu menghadapi konflik kepentingan dengan klien

3. Saya yakin bahwa independensi auditor merupakan salah satu fondasi utama profesi akuntansi dan audit
4. Saya percaya bahwa persyaratan independensi profesi harus ketat pada setiap bidang kegiatan.
5. Saya bangga untuk memberi tahu orang lain bahwa saya independen
6. Saya akan melawan berbagai tipe tekanan untuk mempertahankan independensi.
7. Saya harus bersikap independen sebagai bentuk tanggung jawab profesional saya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari individu yang menjadi responden. Survei dilaksanakan dengan mendistribusikan kuesioner dalam format cetak maupun melalui platform online untuk pengumpulan data. Kuesioner disusun dalam bentuk *Google Form*. Hasil dari distribusi kuesioner yang terkumpul akan dianalisis menggunakan PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modeling) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.1 versi Windows 11.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM), yang merupakan suatu model persamaan struktural. SEM adalah teknik analisis statistik yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis semua variabel secara bersamaan. Salah satu jenis SEM adalah Partial Least Square (PLS), yang berfokus pada penggambaran varians dari variabel dependen saat menganalisis model. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan model persamaan struktural SEM berbasis varian, yaitu PLS, yang menekankan pada hubungan antar variabel.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai demografi para responden. Gambaran tersebut mencakup aspek-aspek seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, tempat kerja, jabatan, serta lama masa kerja responden. Ukuran tendensi sentral, termasuk rata-rata, median, modus, dan kisaran standar deviasi, disajikan untuk memperjelas deskripsi mengenai responden. Selanjutnya, deskripsi karakter variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menampilkan angka rata-rata, standar deviasi, serta nilai variansi minimum dan maksimum (Ghozali, 2018).

3.4.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji *outer model* dilaksanakan melalui pengujian model pengukuran dan pengujian model struktural. Dalam pengujian model pengukuran, dilakukan evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas.

1. **Uji Validitas**

   Uji validitas data bertujuan untuk menilai keabsahan suatu instrumen dalam merepresentasikan suatu konstruk. Sebuah kuesioner dianggap valid jika item-item yang terdapat di dalamnya dapat secara akurat mencerminkan apa yang ingin diukur. Dalam model pengukuran PLS, uji validitas konstruk melibatkan dua parameter. Pertama, untuk uji validitas konvergen, terdapat beberapa pedoman, yaitu *loading factor harus* ≥ 0,70, *average variance extracted* (AVE) minimal ≥ 0,50, dan *communality* juga harus ≥ 0,50. Kedua, untuk uji validitas diskriminan, pedoman

yang digunakan adalah akar AVE harus lebih besar atau sama dengan korelasi antar variabel laten, serta *cross loading* harus ≥ 0,70 dalam satu variabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang mencerminkan tingkat kepercayaan atau keandalan dari sebuah instrumen. Keandalan pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi dalam pengukuran konsep, serta berperan dalam menilai "akurasi" suatu pengukuran (Sekaran, 2017). Dalam analisis PLS, uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *cronbach alpha* yang memiliki batasan minimal ≥ 0,6 dan *composite reliability* dengan batasan minimal ≥ 0,70 (Jogiyanto, 2016).

3.4.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model adalah suatu model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausal antara variabel laten. Dalam analisis PLS, model struktural dievaluasi dengan menggunakan nilai R^2 untuk konstruk dependen. Nilai R^2 berfungsi untuk mengukur seberapa besar variasi perubahan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2, semakin baik kemampuan prediksi dari model penelitian yang diajukan. Kategori nilai R^2 adalah sebagai berikut:

a. R^2 antara 0,25 hingga < 0,50 dikategorikan sebagai model yang buruk;
b. R^2 antara 0,50 hingga < 0,75 dikategorikan sebagai model yang baik;
c. R^2 > 0,75 dikategorikan sebagai model yang sangat baik.

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Parameter yang diestimasi melalui PLS dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) *weight estimate* yang berfungsi untuk menghasilkan skor variabel laten; 2) mencerminkan estimate jalur (*path estimate*) yang menggambarkan hubungan antara variabel laten serta antara variabel laten dengan blok indikatornya (*loading*); 3) berkaitan dengan rata-rata dan posisi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Ketiga estimasi PLS ini diperoleh melalui proses iterasi yang terdiri dari tiga tahap, di mana setiap tahap menghasilkan estimasi yang berbeda. Tahap pertama menghasilkan *weight estimate*; tahap kedua menghasilkan *estimate* untuk *inner model* dan *outer mode*; tahap ketiga menghasilkan *means* dan lokasi konstanta (Ghozali, 2018). Batasan untuk menolak atau menerima signifikansi parameter yang diestimasi adalah 1,645 untuk $\rho < 0,05$.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini berfokus pada pentingnya penggunaan sistem *whistleblowing* sebagai dasar untuk menilai tindak korupsi, pengendalian internal yang dimoderasi oleh dua variabel, yaitu komitmen profesional dan komitmen independensi, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Proses analisis terdiri dari dua tahap: pertama, pengujian variabel tanpa moderasi, yang mencakup sistem *whistleblowing*, pengendalian internal, dan *good governance* terhadap tindak korupsi; kedua, pengujian variabel komitmen profesional dan komitmen independensi

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, guna menentukan adanya hubungan kausal dalam model yang diajukan. Setelah itu, dilakukan pengujian variabel moderasi melalui uji interaksi.

1. **Pengujian Hipotesis Pengaruh *Whistleblowing System*, pengendalian internal, dan *good governance* terhadap Pencegahan Tindak Korupsi**

Untuk membuktikan secara empiris dampak dari *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance* terhadap pencegahan korupsi, penelitian ini menerapkan analisis pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) yang menghasilkan nilai koefisien jalur atau t-statistik. Dalam pelaksanaan uji t, digunakan prosedur pengujian hipotesis statistik serta kriteria untuk pengujian hipotesis, yaitu:

Hipotesis 1

H0: $\gamma 1 \leq 0$

Ha: $\gamma 1 > 0$

Jika nilai t-statistik ≥ 1,645, H0 ditolak. Dengan demikian $\gamma 1 > 0$. Hasil ini berarti mendukung hipotesis penelitian (Ha).

Hipotesis 2

H0: $\gamma 2 \leq 0$

Ha: $\gamma 2 > 0$

Jika nilai t-statistik ≥ 1,645, H0 ditolak. Dengan demikian $\gamma 2 > 0$. Hasil ini berarti mendukung hipotesis penelitian (Ha).

Hipotesis 3

H0: $\gamma 3 \leq 0$

Ha: $\gamma 3 > 0$

Jika nilai t-statistik ≥ 1,645, H0 ditolak. Dengan demikian $\gamma 2 > 0$. Hasil ini berarti mendukung hipotesis penelitian (Ha).

2. Pengujian Variabel Moderasi: Komitmen Profesional dan Komitmen Independensi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang memungkinkan analisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel laten lain sebagai variabel moderasi. Pengaruh variabel laten terhadap interaksi antara variabel laten eksogen dan variabel laten endogen dikenal sebagai *moderated structural equation modeling*. Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai ketergantungan (*contingent effect*) yang kuat dengan hubungan variabel independen dan variabel dependen. Peran variabel moderasi ini adalah untuk memengaruhi hubungan awal antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, variabel moderasi yang dianalisis adalah komitmen profesional dan komitmen independensi. Oleh karena itu, terdapat dua hipotesis yang akan diuji, yaitu:

Hipotesis 3

H0: $\omega 1 \geq 0$

Ha: $\omega 1 < 0$

Jika nilai t-statistik ≥ 1,645, H0 ditolak. Dengan demikian $\omega 1 < 0$. Hasil ini berarti mendukung hipotesis penelitian (Ha).

Hipotesis 4

H0: $\omega 2 \geq 0$

Ha: $\omega 2 < 0$

Jika nilai t-statistik ≥ 1,645, Ho ditolak. Dengan demikian $\omega 2 < 0$. Hasil ini berarti mendukung hipotesis penelitian (Ha).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Analisis Deskriptif Data

Pada subbab ini dilakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dari responden yang terlibat dalam penelitian ini. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik demografis responden, termasuk informasi mengenai jenis kelamin, tingkat Pendidikan, dan lama bekerja. Dengan memahami profil responden, kita dapat memperoleh konteks yang lebih baik mengenai hasil penelitian dan bagaimana variabel-variabel yang diteliti berinteraksi dalam konteks pencegahan tindak korupsi. Data yang disajikan diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai populasi yang menjadi objek penelitian, serta membantu dalam interpretasi hasil analisis lebih lanjut.

Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah) aktif selama tahun 2021-2024 yang bekerja di Inspektorat DKI Jakarta.

Tabel 4. 1

Deskripsi Demografi Responden

Deskripsi	**Kategori**	**Jumlah**	**Persentase (%)**
Jenis Kelamin	Laki-laki	63	39,13
	Perempuan	98	60,87
Total		**161**	**100**
	S1/Sarjana	136	84,47
	S2/Magister	25	15,53
Total		**161**	**100**
Lama Bekerja	< 7 tahun	40	24,84

	8 -14 Tahun	45	27,96
	15 -21 Tahun	18	11,18
	22 -28 Tahun	38	23,60
	> 29 Tahun	20	12,42
Total		**161**	**100**

Berdasarkan tabel yang diberikan, mayoritas total responden dalam penelitian ini adalah perempuan, dengan persentase sebesar 60,87%, sedangkan laki-laki berjumlah 39,13%. Dari segi pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1/Sarjana, yaitu sebesar 84,47%, diikuti oleh responden dengan pendidikan S2/Magister sebanyak 15,53%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Dalam aspek lama bekerja pada posisi saat ini, kategori dengan lama bekerja 8-14 tahun mendominasi dengan persentase 27,96%. Kelompok dengan lama bekerja kurang dari 7 tahun memiliki persentase sebesar 24,84%. Kelompok dengan lama bekerja 15-21 tahun mencapai 11,18%. Sementara itu, kategori dengan lama bekerja 22-28 tahun sebesar 23,60%, dan lebih dari 29 tahun sebesar 12,42%.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana dan pengalaman kerja pada posisi saat ini yang didominasi oleh rentang 8-14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai untuk memberikan data yang relevan terhadap topik penelitian.

4.1.2 Analisis Deskriptif Konstruk

Analisis deskriptif konstruk bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi responden terhadap berbagai variabel yang diukur. Melalui analisis ini, kita akan mengeksplorasi nilai-nilai indikator yang mencerminkan sikap dan pandangan

responden terhadap aspek-aspek penting dalam Pencegahan Tindak Korupsi. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk statistic deskriptif, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, serta rentang nilai, yang akan membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola yang ada di antara responden.

Berdasarkan tabel analisis deskriptif konstruk pada lampiran 3 nilai indikator untuk semua variabel menunjukkan variasi yang mencerminkan persepsi responden terhadap masing-masing aspek yang diukur. Pada variabel Pencegahan Tindak Korupsi (PTK), nilai minimum berkisar 2 hingga 3, dengan nilai maksimum mencapai 5 untuk semua indikator. Nilai rata-rata tertinggi berada pada PTK 2 (Mean = 4,938), menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap proses penerimaan karyawan yang ketat. Sebaliknya, nilai rata-rata terendah ditemukan pada PTK 3 (Mean = 4.435), dengan standar deviasi tertinggi di antara indicator lain (SD = 1.102), yang mencerminkan adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan di kalangan responden terkait pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan.

Untuk variabel *Whistleblowing System* (WBS), nilai minimum terdapat pada skala 2, dan nilai maksimum pada skala 5 di seluruh indicator. Nilai rata-rata tertinggi tercatat pada WBS 8 (Mean = 4.932), yang menunjukkan tingginya pelaksanaan evaluasi terhadap program *whistleblowing system* secara berkala. Di sisi lain, indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah WBS 9 (Mean = 4.398), dengan standar deviasi sebesar 1.076, yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam pandangan responden terkait pemberian penghargaan bagi pelapor kecurangan secara tidak langsung.

Pada variabel Pengendalian Internal (PI), nilai minimum indikator berada pada skala 2 hingga 3, dengan nilai maksimum 5. Rata-rata tertinggi ada pada PI 2 (Mean = 4.938), menunjukkan bahwa mayoritas responden sepakat tentang adanya proses rekrutmen pegawai

yang kompeten. Sementara itu, PI 15 memiliki nilai rata-rata terendah (Mean = 4.689) dan standar deviasi tertinggi (SD = 0.582), menunjukkan persepsi yang bervariasi terhadap evaluasi manajer terkait hasil dari pemantauan yang telah dilakukan.

Variabel *Good Governance* (GG) menunjukkan nilai minimum 2 hingga 3, dan nilai maksimum 5. Indikator GG 4 mencatat nilai rata-rata tertinggi (Mean = 4.913), yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, nilai rata-rata terendah tercatat pada GG 3 (Mean = 4.553), yang berkaitan dengan persepsi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Standar deviasi untuk GG 3 juga yang tertinggi di antara indikator lainnya (SD = 1.021), yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi responden.

Pada variabel Komitmen Profesional (KP), nilai minimum indikator bervariasi dari 2 hingga 3, dengan nilai maksimum 5. Nilai rata-rata tertinggi ditemukan pada KP 5 dan KP 14 (Mean = 4.814), mengindikasikan kebanggaan yang tinggi dari responden terhadap profesi mereka dan tanggung jawab moral yang tinggi untuk tetap berada pada profesi auditor. Di sisi lain, KP 7 dan KP 9 memiliki nilai rata-rata terendah (Mean = 4.466) dan standar deviasi tertinggi KP 7 (SD = 0.849) KP 9 (SD = 0.788), yang menunjukkan persepsi yang bervariasi terkait dengan kesulitan meninggalkan profesi mereka.

Terakhir, variabel Komitmen Independensi (KI) menunjukkan bahwa indikator KI 3 (Mean = 4.913) memiliki rata-rata tertinggi, menandakan penghargaan tinggi terhadap pentingnya independensi sebagai fondasi profesi. Sebaliknya, indikator KI 2 memiliki nilai rata-rata terendah (Mean = 4.441) dan standar deviasi tertinggi (SD = 0.958), mengindikasikan adanya perbedaan pendapat mengenai konflik kepentingan dengan klien.

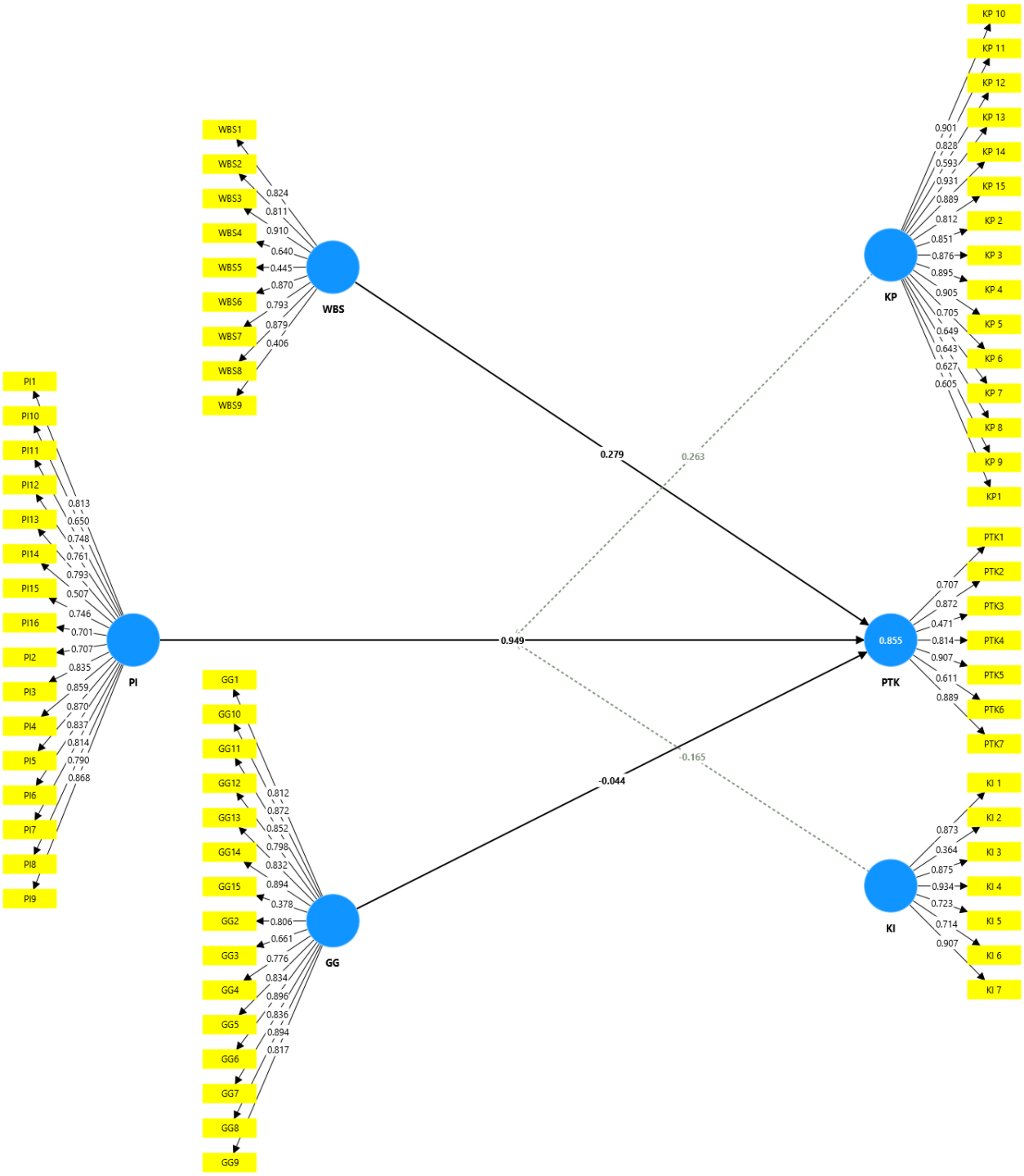
Secara umum, distribusi nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan konsensus positif dari responden terhadap mayoritas indikator, sementara standar deviasi yang lebih besar pada beberapa indikator tertentu mengindikasikan adanya variasi pendapat yang perlu ditinjau lebih lanjut. Variabilitas dalam data mencerminkan persepsi yang beragam, memberikan gambaran lebih luas tentang pandangan responden terhadap setiap variabel yang diukur.

4.2 Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis ini merupakan Langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas konstruk yang telah diidentifikasi sebelumnya. Model pengukuran berfungsi untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat secara akurat mencerminkan konstruk yang dimaksud. Dalam konteks penelitian ini, analisis outer model akan mencakup uji validitas dan uji reliabilitas dari setiap indikator yang terlibat.

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan langkah krusial dalam proses analisis model pengukuran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat secara tepat dan akurat mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen pengukuran tidak hanya relevan, tetapi juga mampu mencerminkan fenomena yang ingin diteliti.



Gambar 4. 1

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Hasil dari analisis outer model menunjukkan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk model yang sedang dikaji. Proses pengolahan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dibangun memenuhi standar reliabilitas dan validitas yang ditetapkan. Dengan kata lain, setiap indikator dinyatakan dapat diandalkan dan relevan untuk mengukur konstruk yang dimaksud dalam penelitian. Dalam konteks ini, reliabilitas berarti bahwa indikator-indikator tersebut memberikan hasil yang konsisten, sementara validitas menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut benar-benar mengukur konstruk yang seharusnya diukur.

Untuk membuktikan bahwa masing-masing indikator dapat diterima dan mampu menjelaskan variabel latennya. Nilai *outer loading* 0.7 atau lebih dianggap memiliki validitas yang cukup kuat.

Tabel 4. 2

Hasil Outer Loading

	GG	KI	KP	PI	PTK	WBS	KI x PI	KP x PI
GG1	0.812							
GG10	0.872							
GG11	0.852							
GG12	0.798							
GG13	0.832							
GG14	0.894							
GG2	0.806							
GG4	0.776							
GG5	0.834							
GG6	0.896							
GG7	0.836							
GG8	0.894							
GG9	0.817							
KI 1		0.873						
KI 3		0.875						
KI 4		0.934						
KI 5		0.723						
KI 6		0.714						
KI 7		0.907						

KP 10			0.901					
KP 11			0.828					
KP 13			0.931					
KP 14			0.889					
KP 15			0.812					
KP 2			0.851					
KP 3			0.876					
KP 4			0.895					
KP 5			0.905					
KP 6			0.705					
PI1				0.813				
PI11				0.748				
PI12				0.761				
PI13				0.793				
PI15				0.746				
PI16				0.701				
PI2				0.707				
PI3				0.835				
PI4				0.859				
PI5				0.870				
PI6				0.837				
PI7				0.814				
PI8				0.790				
PI9				0.868				
PTK1					0.707			
PTK2					0.872			
PTK4					0.814			
PTK5					0.907			
PTK7					0.889			
WBS1						0.824		
WBS2						0.811		
WBS3						0.910		
WBS6						0.870		
WBS7						0.793		
WBS8						0.879		
KI x PI							1.000	
KP x PI								1.000

Berdasarkan Tabel 4.3 dinyatakan bahwa hasil uji validitas untuk tiap item diperoleh dengan Kesimpulan sebagai berikut: Untuk item variabel *Good Governance* (GG) yang tidak

valid yaitu GG15 dan GG3 karena memiliki nilai lebih kecil dari <0,7. Untuk item variabel Komitmen Independensi (KI) sebagian besar item variabel valid kecuali KI2 karena memiliki nilai yang lebih kecil dari <0,7. Untuk variabel Komitmen Profesional (KP) yang tidak valid yaitu KP11, KP7, KP8, KP9, dan KP1 karena memiliki nilai yang lebih kecil dari <0,7. Untuk item variabel Pengendalian Internal (PI) yang tidak valid yaitu PI10 dan PI14 karena memiliki nilai yang lebih kecil dari <0,7. Untuk item variabel Pencegahan Tindak Korupsi (PTK) yang tidak valid yaitu PTK3 dan PTK6 karena memiliki nilai yang lebih kecil dari <0,7. Serta untuk item variabel *Whistleblowing System* (WBS) yang tidak valid yaitu WBS4, WBS5, dan WBS9 karena memiliki nilai yang lebih kecil dari <0,6.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan langkah penting dalam analisis model pengukuran, yang bertujuan untuk menilai konsistensi dan stabilitas dari instrumen pengukuran yang digunakan. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan dalam pengukuran yang berulang.

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan dua metode utama, yaitu Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Cronbach’s Alpha digunakan untuk mengukur sejauh mana item-item dalam suatu konstruk saling berkorelasi dan memberikan kontribusi terhadap pengukuran konstruk tersebut. Sementara itu, Composite Reliability memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keandalan instrumen dengan mempertimbangkan variabilitas antar item. Pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 dan Composite Reliability ≥ 0,70.

Tabel 4. 3

Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
GG	0.959	0.966	0.965	0.651
KI	0.888	0.920	0.918	0.627
KP	0.955	0.962	0.961	0.625
PI	0.954	0.961	0.959	0.599
PTK	0.876	0.907	0.907	0.590
WBS	0.894	0.925	0.917	0.566

Hasil uji Construct Reliability dan Validity menunjukkan bahwa sebagian keseluruhan variabel dalam model memiliki kualitas pengukuran yang baik. Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha setiap variabel memiliki nilai > 0,60. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan setiap variabel reliabel. Sedangkan jika dilihat berdasarkan nilai Composite Reliability semua variabel memiliki nilai Composite Reliability > 0.70. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Average Variance Extracted (AVE) memiliki nilai AVE > 0.5 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada setiap variabel sudah valid.

Secara keseluruhan, uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur konstruk yang diteliti, meskipun ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil.

4.3 Analisis Model Struktural (Inner Model)

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan kausalitas antara variabel-variabel laten yang telah diidentifikasi sebelumnya. Model structural berfungsi untuk menggambarkan dan menguji bagaimana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen, serta untuk memahami dinamika interaksi antar variabel dalam konteks penelitian.

Penelitian ini menggunakan nilai R-Squared sebagai ukuran untuk menilai seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R-Squared yang tinggi menunjukkan bahwa model yang diajukan memiliki kemampuan prediksi yang baik, sedangkan nilai yang rendah dapat mengindikasikan perlunya revisi atau penyesuaian dalam model.

4.3.1 Nilai R-Square

Untuk melakukan pengujian model, evaluasi model dapat dilakukan dengan melihat nilai R-square adjusted. R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen) sedangkan R-Square Adjusted adalah ukuran kesesuaian yang mengoreksi akurasi model regresi linier.

Tabel 4. 4

Nilai R-Square

	R-square	R-square adjusted
PTK	0.855	0.849

Berdasarkan hasil uji R-square, nilai sebesar 0,855 menunjukkan bahwa 85,5% variansi pada variabel Pencegahan Tindak Korupsi (PTK) dapat dijelaskan oleh variabel independent *Whistleblowing System* (WBS), *Good Governance* (GG), dan Pengendalian Internal (PI), serta variabel moderasi Komitmen Independensi (KI) dan Komitmen Profesional (KP). Nilai ini menunjukkan kemampuan penjelasan model yang sangat kuat, sesuai dengan kriteria Hair *et al.,* (2019), yang menyatakan bahwa R-squared di atas 0,75 menunjukkan pengaruh yang kuat.

Nilai R-square adjusted sebesar 0,849 menunjukkan bahwa model tetap akurat meskipun mempertimbangkan kompleksitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti *whistleblowing system, good governance,* dan pengendalian internal, komitmen profes ional dan komitmen independensi sangat relevan dalam mencegah tindak korupsi. Nilai R-Square adjusted

menunjukkan bahwa 84,9% variasi pada variabel Pencegahan Tindak Korupsi (PTK) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

4.4 Pengujian Hipotesis

Sub bab ini akan membahas proses pengujian hipotesis yang merupakan langkah krusial dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan teori dan literatur yang ada. Melalui pengujian ini, dapat ditentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.

Tabel 4. 5

Hasil Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
WBS -> PTK	0.279	0.265	0.143	1.942	0.052
PI -> PTK	0.949	0.921	0.256	3.708	0.000
GG -> PTK	-0.044	-0.062	0.168	0.265	0.791
KI x PI -> PTK	-0.165	-0.166	0.083	1.986	0.047
KP x PI -> PTK	0.263	0.233	0.115	2.289	0.022
KI -> PTK	-0.195	-0.209	0.142	1.374	0.169
KP -> PTK	0.068	0.080	0.093	0.732	0.464

4.4.1 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara *Whistleblowing System* (WBS) dan Pencegahan Tindak Korupsi (PTK) tidak signifikan dengan nilai T-Statistics sebesar 1,942 dan P-Values sebesar 0,052. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan *Whistleblowing System* tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi dalam model ini. Hal ini bertolak belakang dari asumsi awal yang berkaitan dengan *prosocial*

organizational behavior theory bahwa semakin tinggi pegawai atau pihak yang bersangkutan melakukan tindakan *whistleblowing*, maka hal ini dapat menekan dan mencegah terjadinya korupsi. Namun, untuk mendorong individu berperilaku prososial, mereka perlu merasa aman dan didukung dalam melakukan pelaporan.

Dalam hipotesis awal, diasumsikan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi. Berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim et al., (2017), Marliza (2018), Endarningtyas & Chariri (2022), Pramudyastuti et al., (2021), Paramitha (2017), Wardah et al., (2022), dan Islamiyah et al., (2020) penelitian ini mengharapkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan yang efektif, individu (pegawai atau pihak luar) akan lebih cenderung untuk melaporkan tindakan korupsi, yang pada gilirannya dapat mencegah terjadinya korupsi di dalam organisasi. Setelah melakukan pengujian hipotesis, hasil menunjukkan bahwa pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan tindak korupsi tidak signifikan. Perbedaan antara hipotesis awal dan akhir menunjukkan tantangan dalam implementasi *whistleblowing system* yang efektif dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Meskipun *whistleblowing system* dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pelaporan pelanggaran, kemungkinan masih ada faktor laain yang lebih dominan atau dapat menghambat efektivitas sistem tersebut.

Ketidaksesuaian ini dapat terjadi kemungkinan karena adanya faktor psikologis yang menghalangi individu untuk berperilaku prososial, seperti ketakutan akan pembalasan atau skeptisisme terhadap efektivitas sistem pelaporan. Jika individu merasa bahwa melaporkan tindakan kecurangan tidak akan membawa perubahan atau justru akan merugikan mereka, maka mereka cenderung tidak akan menggunakan *whistleblowing system*, meskipun sistem tersebut dirancang untuk mendorong perilaku prososial.

Prosocial Organizational Behavior Theory menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku prososial. Jika organisasi tidak menciptakan budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, maka meskipun ada *whistleblowing system*, individu mungkin tidak akan merasa termotivasi untuk melaporkan tindakan kecurangan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pelaporan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana organisasi membangun budaya yang mendukung perilaku prososial.

4.4.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Untuk menilai apakah Pengendalian Internal (PI) berpengaruh terhadap Pencegahan Tindak Korupsi (PTK), hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki Path Coefficient positif sebesar 0.508, hubungan tersebut signifikan dengan T-Statistics sebesar 3,708 dan P-Values sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan dalam pencegahan tindak korupsi. Hal ini sesuai dengan asumsi awal yang berkaitan dengan *Fraud Triangle Theory,* kecurangan terjadi Ketika ada tiga elemen: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Teori ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap kecurangan. Ketika organisasi menerapkan kontrol yang ketat dan prosedur audit yang baik, mereka menciptakan lingkungan yang tidak hanya mencegah kecurangan tetapi juga mendorong perilaku etis di antara karyawan. Hal ini sejalan dengan asumsi awal bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi.

Dalam hipotesis awal, diasumsikan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi. Penelitian ini berasumsi bahwa

pengendalian yang baik dapat mencegah, mendeteksi, dan mengurangi peluang terjadinya tindak korupsi dalam organisasi. Hasil penelitian yang diperoleh mendukung hipotesis awal, di mana pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Kurniawan (2019), Damayanti (2021), Farochi (2022), Jannah (2016) dan Nugroho (2022).

Dengan adanya pengendalian internal yang kuat, kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat diminimalkan. Pengendalian internal yang baik juga dapat mengurangi tekanan dan rasionalisasi. Dengan demikian, pengendalian internal yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang menolak korupsi. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dapat secara signifikan mengurangi risiko tindak korupsi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Fraud Triangle.

4.4.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Dalam menjawab pertanyaan apakah *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan tindak korupsi, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara *Good Governance* (GG) dan Pencegahan Tindak Korupsi (PTK) tidak signifikan dengan nilai T-Statistics sebesar 0,265 dan P-Values sebesar 0,791. Dengan demikian, *good governance* dalam model ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan tindak korupsi.

Hal ini bertolak belakang dengan asumsi awal bahwa *good governance* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dan dapat memperkecil terjadinya fraud. Salah satu alasan ketidaksesuaian ini adalah bahwa implementasi *good governance* mungkin tidak konsisten atau tidak diikuti secara menyeluruh dalam organisasi. Jika kebijakan dan

prosedur yang terkait dengan *good governance* tidak diterapkan dengan baik, maka dampaknya terhadap pencegahan korupsi akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *good governance* tidak menjamin efektivitasnya tanpa dukungan implementasi yang kuat.

Dalam hipotesis awal, diasumsikan bahwa penerapan *good governance* akan berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak korupsi berdasarkan penelitian terdahulu oleh Jannah (2016), Kurniawan (2019), Damayanti (2021), Ulum (2022), dan Hambali et al., (2023). Hipotesis ini mencerminkan pandangan bahwa praktik tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan etika, akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak korupsi dalam organisasi. Namum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *good governance* terhadap pencegahan tindak korupsi tidak signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun hipotesis awal membayangkan adanya pengaruh positif yang kuat dari *good governance*, hasil akhir penelitian tersebut tidak mendukung asumsi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam organisasi mungkin tidak cukup efektif atau mungkin tidak diterapkan dengan konsisten, sehingga tidak memberikan dampak signifikan dalam mencegah tindak korupsi.

Budaya organisasi yang lemah dapat menghambat efektivitas *good governance*. Jika nilai-nilai etika dan integritas tidak dijunjung tinggi dalam budaya organisasi, maka prinsip-prinsip *good governance* tidak akan diinternalisasi oleh anggota organisasi. Ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ada, sehingga mengurangi potensi *good governance* dalam mencegah korupsi.

Selain itu, faktor psikologis individu, seperti sikap terhadap *whistleblowing*, juga dapat mempengaruhi efektivitas *good governance*. Jika individu merasa takut untuk melaporkan

tindakan korupsi atau percaya bahwa pelaporan tidak akan membawa perubahan, maka mereka mungkin tidak akan memanfaatkan sistem *good governance* yang ada, meskipun sistem tersebut dirancang untuk mencegah korupsi

Dengan demikian, meskipun *good governance* memiliki potensi untuk mencegah korupsi, berbagai faktor yang mempengaruhi implementasinya dan keterkaitannya dengan teori Fraud Triangle menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pencegahan tindak korupsi bisa menjadi tidak signifikan.

4.4.4 Pengaruh Komitmen Profesional Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Terkait pertanyaan apakah Komitmen Profesional (KP) memoderasi pengaruh Pengendalian Internal (PI) terhadap Pencegahan Tindak Korupsi (PTK), hasil analisis menunjukkan bahwa moderasi KP x PI signifikan dengan nilai T-Statistics sebesar 2,289 dan P-Values sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Profesional dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara Pengendalian Internal dan Pencegahan Tindak Korupsi.

Hal ini sesuai dengan asumsi awal bahwa komitmen profesional berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan tindak korupsi. Asumsi ini didasarkan pada pemahaman bahwa individu dengan komitmen profesional yang tinggi akan lebih patuh terhadap prosedur pengendalian internal dan lebih berani melaporkan pelanggaran, sehingga meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah korupsi.

Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* dimana dalam konteks ini, pengendalian internal berfungsi untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan, sementara komitmen profesional dapat mengurangi rasionalisasi dan menolak tekanan untuk berbuat curang. Dengan demikian, komitmen profesional yang tinggi dapat memperkuat pengendalian internal dalam mencegah tindak korupsi, sesuai dengan asumsi awal penelitian.

4.4.5 Pengaruh Komitmen Independensi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Untuk menjawab apakah Komitmen Independensi (KI) memoderasi pengaruh Pengendalian Internal (PI) terhadap Pencegahan Tindak Korupsi (PTK), hasil analisis menunjukkan bahwa moderasi KI x PI juga signifikan dengan nilai T-Statistics sebesar 1,986 dan P-Values sebesar 0,022. Ini menunjukkan bahwa Komitmen Independensi berperan sebagai moderator yang signifikan dalam hubungan tersebut.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa komitmen independensi berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan tindak korupsi. Asumsi ini didasarkan pada pemahaman bahwa individu yang memiliki komitmen independensi yang tinggi cenderung lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, sehingga mereka lebih mampu mematuhi prosedur pengendalian internal dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Berhubungan dengan *Fraud Triangle Theory*, dalam konteks ini, pengendalian internal berfungsi untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan, sementara komitmen independensi dapat mengurangi pengaruh tekanan dan rasionalisasi yang mungkin mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan curang. Dengan demikian, komitmen independensi yang tinggi dapat

memperkuat pengendalian internal dalam mencegah tindak korupsi, sesuai dengan asumsi awal penelitian.

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hanya Pengendalian Internal yang menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara *Good Governance*, Komitmen Independensi, dan Komitmen Profesional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan Tindak Korupsi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Tindak Korupsi, dengan nilai T-statistik yang menunjukkan hubungan yang kuat. Sebaliknya, variabel *Good Governance*, Komitmen Independensi, dan Komitmen Profesional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan Tindak Korupsi.

Komitmen Profesional dan Komitmen Independensi berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara Pengendalian Internal dan Pencegahan Tindak Korupsi. Ini menunjukkan bahwa sikap profesional dan independensi auditor dapat meningkatkan efektivitas sistem pelaporan kecurangan dalam mencegah korupsi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik, dengan nilai R-square yang tinggi, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam Pencegahan Tindak Korupsi

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada auditor dan pengawas penyelenggara urusan pemerintah di DKI Jakarta, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Kedua, metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner dapat menyebabkan bias, tergantung pada kejujuran dan pemahaman responden dalam menjawab pertanyaan yang

diajukan. Selain itu, meskipun penelitian ini mencakup variabel-variabel penting seperti *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance*, ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain juga berpengaruh terhadap pencegahan korupsi tidak diukur atau diperhitungkan.

Keterbatasan waktu dan konteks penelitian juga menjadi perhatian, karena penelitian ini dilakukan dalam periode tertentu dan dalam konteks spesifik, yang dapat mempengaruhi relevansi hasil jika diterapkan pada situasi yang berbeda. Terakhir, analisis yang dilakukan mungkin tidak mencakup semua teknik statistik yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai hubungan antar variabel.

Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif.

5.3 Saran

Organisasi dan institusi yang ingin mencegah tindak korupsi disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian internal mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, peningkatan prosedur audit, dan penerapan kebijakan yang ketat.

Meskipun tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, penting untuk terus mengembangkan praktik *Good Governance*. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mencegah korupsi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana meningkatkan komitmen profesional dan independensi di kalangan auditor dan pegawai, karena kedua factor ini terbukti berperan penting dalam efektivitas pengendalian internal.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap Pencegahan Tindak Korupsi, serta untuk melakukan analisis longitudinal untuk melihat perubahan dalam pengaruh variabel seiring waktu.

Organisasi perlu menerapkan dan mempromosikan *Whistleblowing System* yang efektif, serta memberikan perlindungan kepada pelapor untuk mendorong lebih banyak individu melaporkan tindakan kecurangan tanpa takut akan pembalasan. Saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan tindak korupsi di berbagai organisasi dan institusi.

DAFTAR PUSTAKA

Asliani, & Koto, I. (2022). Kajian hukum terhadap perlindungan whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi. *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum*, *3*(2), 242–247.

Association of Certified Fraud Examiners. (2019). Survei fraud indonesia. *ACFE Indonesia Chapter*.

Badrulhuda, A., Hadiyati, S. N., & Yusup, J. (2021). Komitmen profesional dan sensitivitas etis dalam intensi melakukan whistleblowing. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *4*(4), 522–543.

Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. *The Academy of Management Review*, *11*(4), 710.

Chairi, N., Indriani, M., & Darwis. (2022). Kompetensi, moralitas dan sistem whistleblowing dalam pencegahan fraud: studi empiris pada organisasi pemerintahan indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *22*(1), 119–142.

Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "detecting and predicting financial statement fraud: the effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*, *13*(1), 53-81.

Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, *3*(2), 232–245.

Darmawan, D., & Mardikaningsih, R. (2021). Studi tentang peran kualitas kehidupan kerja, kepemimpinan dan persepsi dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi. *Jurnal Simki Economic*, *4*(1), 89–98.

Dewi, N. K. A. R., & Dewi, I. G. A. A. P. (2019). Pengaruh profesionalisme, komitmen organisasi dan sensitivitas etika terhadap intensi dalam melakukan whistleblowing: studi kasus pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *4*(1), 1.

Endarningtyas, O. D., & Chariri, A. (2022). Apakah sistem pelaporan pelanggaran efektif mencegah korupsi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *13*(1), 74–84.

Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan good corporae governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *6*(1), 86–92.

Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 4.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Yoga Pratama.

Hailah, Nirwana, & Mangngalla, M. (2021). Pengaruh pemberian reward dan komitmen

profesional auditor terhadap niat melakukan whistleblowing. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, *3*(1), 54–63.

Hakim, T. I. R., Subroto, B., & Andayani, W. (2017). Faktor situasional dan demografis sebagai prediktor niat individu untuk melakukan whistleblowing. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *3*(2), 134–142.

Hambali, R., Sitorus, S. A., Wibowo, T. S., Bakri, A. A., & Sucipto, B. (2023). Fraud Prevention: an Review Through Good Corporate Governance and Individual Morality. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *7*(2), 1–9.

Indria, M. F. N., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2015). Pengaruh independensi auditor internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan aset. *Prosiding Akuntansi*, *1*(2), 360–367.

Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *8*(1), 1–13.

Jannah, S. F. (2016). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud di bank perkreditan rakyat (studi pada bank perkreditan rakyat di surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *7*(2), 200.

Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh good corporate governance dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, *1*(1), 55–60.

Kusumastuti, R. (2022). *Kinerja kerja auditor: tinjauan melalui kepuasan kerja dan komitmen profesional* (Y. A. Sari (ed.)). Penerbit Adab.

Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti. (2017). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud di dalam proses pengadaan barang dan jasa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, *3*(2), 43–60.

Lee, G., & Xiao, X. (2018). Whistleblowing on accounting-related misconduct: A synthesis of the literature. *Journal of Accounting Literature*, *41*(February 2016), 22–46.

Mansor, T. M. T., Ariff, A. M., & Hashim, H. A. (2020). Whistleblowing by auditors: the role of professional commitment and independence commitment. *Managerial Auditing Journal*, *35*(8), 1033–1055.

Marliza, R. (2018). Pengaruh personal cost of reporting, komitmen organisasi, dan tingkat keseriusan kecurangan terhadap niat melakukan whistleblowing (studi empiris pada organisasi perangkat daerah kota payakumbuh). *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 1–20.

Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, *2*(3), 301–316.

Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment of whistleblowing as an accountability mechanism to curb corruption and fraud in a developing democracy. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, *33*(6), 1335–1366.

Paramitha, N. P. Y. (2017). Pengaruh whistleblowing system, good corporate governance dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa (doctoral dissertation, universitas pendidikan ganesha). *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, *1*(1), 1–7.

Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap tindak kecurangan dengan independensi sebagai moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *6*(1), 115.

Rahmi, M., Fitri, S. A., Putra, Y. E., Masdar, R., & Marlin, K. (2024). Peran independensi auditor internal dan whistleblowing system dalam mendeteksi fraud: literature review. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *5*(1), 597–606.

Sekaran, U. 2017. Metode penelitian untuk bisnis. (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.

Shawver, T. J., & Shawver, T. A. (2018). The impact of moral reasoning on whistleblowing intentions. *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting*, *21*(1), 153–168.

Sholihun, S., & Yanti, H. B. (2021). Determinan intensi whistleblowing dengan insentif whistleblowing sebagai variabel moderasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *21*(1), 35–50.

Sukesi, S. (2017). Pengaruh karakteristik personal auditor terhadap penerimaan perilaku disfungsi audit pada unit organisasi tni angkatan laut. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *15*(2), 161–170.

Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Peran sistem pengendalian internal dan good corporate governance dalam upaya pencegahan fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(2), 331–340.

Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh whistleblowing system, internal control, leadership dan budaya organisasi terhadap fraud prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *11*(2), 233–247.

Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, *10*(3), 368–379.

Wijaya, C. L., & Adechandra, D. (2020). Pengaruh profesionalisme dan independensi terhadap pencegahan kecurangan dengan iklim etika-egoisme sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *9*(1), 78.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

DATA RESPONDEN

Isikan dengan huruf atau angka dan berilah tanda ✓ (centang) atau X (silang) pada kotak yang tersedia.

1. Tuliskan minimal 2 huruf inisial nama Ibu/Bapak ☐ ☐ ☐ ☐
2. Jenis Kelamin: *Laki-laki* ☐ *Perempuan* ☐ *Umur* ☐ *Tahun*
3. Pendidkan Terakhir: *S1/Sarjana* ☐ *S3/Doktor* ☐
   S2/Magister ☐ *Lainnya (Mohon Diisi)* ☐
4. Lamanya bekerja pada jabatan sekarang: ☐ *Tahun* ☐ *Bulan*

KUESIONER PENELITIAN

Sebelum menjawab pernyataan, mohon dibaca terlebih dahulu dengan baik dan benar. Isilah kuesioner tersebut sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja. Anda diminta untuk memilih jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai dengan kolom yang tersedia.

Keterangan:

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- N : Netral

- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Anda diperkenankan memilih netral (N) jika anda benar-benar tidak mengetahui pernyataan yang diajukan atau belum pernah mengalami situasi dalam pernyataan yang diajukan.

1. Whistleblowing System

No	Pernyataan	Kategori Jawaban				
		STS (1)	**TS (2)**	**N (3)**	**S (4)**	**SS (5)**
Aspek Struktural						
1	Saya bersedia ikut serta berkomitmen menjalankan *whistleblowing system* untuk mencegah tindakan kecurangan					
2	Saya bersedia melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi					
3	Seseorang yang mengelola *whistleblowing system* adalah seseorang yang memiliki sikap profesional dan independen					
Aspek Operasional						
4	Saya menggunakan nama samaran atau *anonym* pada saat melaporkan suatu kecurangan/pelanggaran					
5	Laporan kecurangan/pelanggaran yang saya laporkan harus diselidiki lebih lanjut					
6	Saya tidak merasa terbebani akan adanya penerapan *whistleblowing system* pada dinas tempat saya bekerja					

Aspek Perawatan						
7	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program *whistleblowing system* untuk meningkatkan efektifitas					
8	Dinas tempat saya bekerja tidak melakukan rapat evaluasi terhadap program *whistleblowing system* secara berkala					
9	Memberikan penghargaan bagi seseorang bagi pelapor kecurangan (secara tidak langsung) agar identitas pelapor tetap terjaga					

2. **Pengendalian Internal**

No	**Pernyataan**	**Kategori Jawaban**				
		STS (1)	**TS (2)**	**N (3)**	**S (4)**	**SS (5)**
Lingkungan Pengendalian						
1	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki integritas yang baik dan nilai-nilai etika dalam pencapaian tujuan instansi					
2	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki proses rekrutmen pegawai yang kompeten					
3	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki struktur organisasi yang jelas dalam mencerminkan tugas dan wewenang untuk pencapaian tujuan instansi					
4	Adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upaya meningkatkan SDM yang jujur dan bertanggung jawab					

	terhadap tugasnya					
Penilaian Risiko						
5	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki tujuan organisasi yang jelas untuk memungkinkan identifikasi terjadinya risiko					
6	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki tujuan organisasi yang jelas untuk memungkinkan penilaian risiko					
7	Adanya penetapan pengendalian internal yang jelas					
8	Tempat Bapak/Ibu bekerja mampu mengidentifikasi perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal					
Aktivitas Pengendalian						
9	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan					
10	Pemantauan dilakukan secara periodik untuk dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan					
11	Adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab karyawan					
Informasi dan Komunikasi						
12	Informasi diidentifikasikan dan dikomunikasikan dengan baik.					
13	Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan					
Pemantauan Pengendalian						

14	Manajer memantau kinerja karyawan terus menerus					
15	Manajer mengevaluasi hasil dari pemantauan yang telah dilakukan					
16	Manajer menindaklanjuti hasil pemantauan					

3. Good Governance

No	**Pernyataan**	**Kategori Jawaban**				
		STS (1)	**TS (2)**	**N (3)**	**S (4)**	**SS (5)**
Akuntabilitas						
1	Tempat Bapak/Ibu bekerja dapat menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi dan misi					
2	Tempat Bapak/Ibu bekerja dapat memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif					
3	Karyawan di tempat Bapak/Ibu bekerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik					
Responsibilitas						
4	Tempat Bapak/Ibu bekerja berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan					
5	Tempat Bapak/Ibu bekerja berpegang pada kepatuhan terhadap anggaran dasar dan peraturan instansi					

6	Tempat Bapak/Ibu bekerja melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan					
Transparansi						
7	Mampu menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, dan jelas sehingga mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan					
8	Tempat Bapak/Ibu bekerja mampu menyediakan informasi secara akurat dan dapat diperbandingkan sehingga mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan					
9	Tempat Bapak/Ibu bekerja dapat menerapkan prinsip keterbukaan					
Kewajaran						
10	Tempat Bapak/Ibu bekerja telah memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan instansi					
11	Tempat Bapak/Ibu bekerja memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan					
Independensi						
12	Tempat Bapak/Ibu bekerja tidak terpengaruh oleh pihak manapun					
13	Tempat Bapak/Ibu bekerja tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari kepentingan dan dari segala					

	pengaruh atau tekanan					
14	Tempat Bapak/Ibu bekerja telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang undangan, tidak saling mendominasi dan saling melempar tanggung jawab satu sama lain					
15	Tempat Bapak/Ibu bekerja tidak pernah menerima atau melakukan suap dalam bentuk apapun					

4. **Komitmen Profesional**

No	**Pernyataan**	**Kategori Jawaban**				
		STS (1)	**TS (2)**	**N (3)**	**S (4)**	**SS (5)**
1	Profesi sebagai auditor untuk citra diri saya.					
2	Saya memiliki keterikatan emosional dengan profesi auditor.					
3	Saya merasa bahagia jika dapat menghabiskan karir sebagai auditor.					
4	Saya antusias tentang profesi auditor.					
5	Saya bangga menjadi bagian dari profesi auditor					
6	Saya merasa rugi jika beralih dari profesi auditor ke profesi lain.					
7	Mengubah profesi sekarang akan memerlukan pengorbanan pribadi yang besar.					
8	Beralih dari profesi auditor ke profesi lain merupakan suatu					

	hal yang sulit saya lakukan pada saat ini.					
9	Banyak yang terganggu dalam kehidupan saya jika saya beralih dari profesi auditor ke profesi lain.					
10	Saya akan menerima semua jenis pekerjaan yang berkaitan dengan profesi auditor					
11	Saya tidak menemui kesulitan dalam menyepakati aturan-aturan yang ada dalam profesi auditor.					
12	Saya merasa bersalah jika meninggalkan atau keluar dari pekerjaan sebagai auditor					
13	Saya memiliki loyalitas pada profesi auditor sehingga saya tetap menekuni profesi auditor.					
14	Saya memiliki tanggung jawab moral untuk tetap berada pada profesi auditor.					
15	Saya meyakini bahwa bekerja sebagai auditor merupakan suatu kewajiban.					

5. **Komitmen Independensi**

No	**Pernyataan**	**Kategori Jawaban**				
		STS (1)	**TS (2)**	**N (3)**	**S (4)**	**SS (5)**
1	Saya sangat senang dengan memilih pekerjaan yang mengharuskan saya untuk bertindak independen.					
2	Saya tidak pernah menghadapi konflik kepentingan dengan					

	klien.					
3	Saya yakin bahwa independensi auditor merupakan salah satu fondasi utama profesi akuntansi dan audit.					
4	Saya percaya bahwa persyaratan independensi profesi harus ketat pada setiap bidang kegiatan.					
5	Saya bangga untuk memberi tahu orang lain bahwa saya independen.					
6	Saya akan melawan berbagai tipe tekanan untuk mempertahankan independensi.					
7	Saya harus bersikap independen sebagai bentuk tanggung jawab profesional saya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum.					

6. **Pencegahan Tindak Korupsi**

No	**Pernyataan**	**Kategori Jawaban**				
		STS (1)	**TS (2)**	**N (3)**	**S (4)**	**SS (5)**
1	Tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki program pengendalian anti *fraud* (korupsi) untuk mengarahkan tindakan karyawan					
2	Tempat Bapak/Ibu bekerja melakukan seleksi yang ketat dan efektif pada proses penerimaan karyawan					
3	Tempat Bapak/Ibu bekerja tidak pernah melakukan pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan (korupsi)					

4	Tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan sistem penghargaan terhadap hasil kerja, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua karyawan, agar tindak kecurangan (korupsi) bisa dikurangi					
5	Tempat Bapak/Ibu bekerja memberlakukan kode etik di lingkungan karyawan untuk membangun budaya jujur dan keterbukaan					
6	Tempat Bapak/Ibu bekerja memberikan bantuan kepada karyawan yang mengalami kesulitan ekonomi untuk menekan jumlah kecurangan (korupsi).					
7	Tempat Bapak/Ibu bekerja menerapkan sanksi yang tegas untuk meminimalisasi adanya kecurangan (*fraud*).					

Lampiran 2: Surat Permohonan Ijin Penelitian

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 681546, 883087, 885376,
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 1661/DEK/10/PMD/VIII/2024
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala/pimpinan
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
DKI Jakarta

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikannya di Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah Tesis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	: Rahmatika M Arsyad
No. Mahasiswa	: 21919053
Program Studi	: Akuntansi Program Magister
Judul Tesis	: Pengaruh Whistleblowing System, Pengendalian Internal dan Good Governance terhadap Pencegahan Tindak Korupsi dengan Komitmen Profesional dan Komitmen Independensi sebagai Variabel Moderasi
Nomer HP	: 085398714767

bermaksud mohon untuk mendapatkan data/keterangan pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan Tesis.

Adapun hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan. Oleh karena itu, kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian yang diperlukan mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 27 Agustus 2024
Dekan,

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 943120101

TANDA TERIMA SURAT
INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA
TGL : 10-9-2024

Lampiran 3: Analisis Statistik Deskriptif

Name	No.	Mean	Median	Scale min	Scale max	Standard deviation
PTK1	1	4.807	5.000	3.000	5.000	0.453
PTK2	2	4.938	5.000	3.000	5.000	0.288
PTK3	3	4.435	5.000	2.000	5.000	1.102
PTK4	4	4.776	5.000	3.000	5.000	0.522
PTK5	5	4.913	5.000	3.000	5.000	0.323
PTK6	6	4.472	5.000	3.000	5.000	0.697
PTK7	7	4.925	5.000	4.000	5.000	0.263
WBS1	8	4.901	5.000	3.000	5.000	0.373
WBS2	9	4.739	5.000	2.000	5.000	0.784
WBS3	10	4.925	5.000	4.000	5.000	0.263
WBS4	11	4.627	5.000	2.000	5.000	0.771
WBS5	12	4.602	5.000	2.000	5.000	0.851
WBS6	13	4.901	5.000	4.000	5.000	0.299
WBS7	14	4.752	5.000	2.000	5.000	0.780
WBS8	15	4.932	5.000	4.000	5.000	0.252
WBS9	16	4.398	5.000	2.000	5.000	1.076
PI1	17	4.913	5.000	3.000	5.000	0.323
PI2	18	4.938	5.000	3.000	5.000	0.288
PI3	19	4.913	5.000	4.000	5.000	0.282
PI4	20	4.876	5.000	3.000	5.000	0.366
PI5	21	4.888	5.000	3.000	5.000	0.352
PI6	22	4.876	5.000	3.000	5.000	0.366
PI7	23	4.814	5.000	3.000	5.000	0.420
PI8	24	4.826	5.000	3.000	5.000	0.411
PI9	25	4.901	5.000	4.000	5.000	0.299
PI10	26	4.814	5.000	3.000	5.000	0.449
PI11	27	4.863	5.000	3.000	5.000	0.409
PI12	28	4.776	5.000	3.000	5.000	0.498
PI13	29	4.863	5.000	3.000	5.000	0.394
PI14	30	4.832	5.000	2.000	5.000	0.623
PI15	31	4.689	5.000	2.000	5.000	0.582
PI16	32	4.714	5.000	3.000	5.000	0.478
GG1	33	4.863	5.000	3.000	5.000	0.378
GG2	34	4.801	5.000	3.000	5.000	0.429
GG3	35	4.553	5.000	2.000	5.000	1.021
GG4	36	4.913	5.000	4.000	5.000	0.282
GG5	37	4.901	5.000	4.000	5.000	0.299
GG6	38	4.876	5.000	3.000	5.000	0.366

GG7	39	4.851	5.000	3.000	5.000	0.389
GG8	40	4.839	5.000	3.000	5.000	0.400
GG9	41	4.839	5.000	4.000	5.000	0.368
GG10	42	4.851	5.000	3.000	5.000	0.389
GG11	43	4.857	5.000	3.000	5.000	0.384
GG12	44	4.801	5.000	3.000	5.000	0.429
GG13	45	4.814	5.000	3.000	5.000	0.420
GG14	46	4.876	5.000	4.000	5.000	0.330
GG15	47	4.758	5.000	2.000	5.000	0.762
KP1	48	4.795	5.000	3.000	5.000	0.461
KP 2	49	4.795	5.000	3.000	5.000	0.461
KP 3	50	4.727	5.000	3.000	5.000	0.523
KP 4	51	4.789	5.000	3.000	5.000	0.438
KP 5	52	4.814	5.000	3.000	5.000	0.420
KP 6	53	4.553	5.000	2.000	5.000	0.668
KP 7	54	4.466	5.000	2.000	5.000	0.849
KP 8	55	4.503	5.000	2.000	5.000	0.765
KP 9	56	4.466	5.000	2.000	5.000	0.788
KP 10	57	4.714	5.000	2.000	5.000	0.635
KP 11	58	4.776	5.000	2.000	5.000	0.568
KP 12	59	4.627	5.000	3.000	5.000	0.598
KP 13	60	4.801	5.000	3.000	5.000	0.457
KP 14	61	4.814	5.000	2.000	5.000	0.476
KP 15	62	4.801	5.000	3.000	5.000	0.484
KI 1	63	4.863	5.000	3.000	5.000	0.378
KI 2	64	4.441	5.000	2.000	5.000	0.958
KI 3	65	4.913	5.000	4.000	5.000	0.282
KI 4	66	4.901	5.000	4.000	5.000	0.299
KI 5	67	4.826	5.000	3.000	5.000	0.467
KI 6	68	4.789	5.000	3.000	5.000	0.465
KI 7	69	4.892	5.000	4.000	5.000	0.310

Lampiran 4: Hasil Outer Loading

	GG	KI	KP	PI	PTK	WBS	KI x PI	KP x PI
GG1	0.812							
GG10	0.872							
GG11	0.852							
GG12	0.798							
GG13	0.832							
GG14	0.894							
GG15	0.378							

GG2	0.806							
GG3	0.661							
GG4	0.776							
GG5	0.834							
GG6	0.896							
GG7	0.836							
GG8	0.894							
GG9	0.817							
KI 1		0.873						
KI 2		0.364						
KI 3		0.875						
KI 4		0.934						
KI 5		0.723						
KI 6		0.714						
KI 7		0.907						
KP 10			0.901					
KP 11			0.828					
KP 12			0.593					
KP 13			0.931					
KP 14			0.889					
KP 15			0.812					
KP 2			0.851					
KP 3			0.876					
KP 4			0.895					
KP 5			0.905					
KP 6			0.705					
KP 7			0.649					
KP 8			0.643					
KP 9			0.627					
KP1			0.605					
PI1				0.813				
PI10				0.650				
PI11				0.748				
PI12				0.761				
PI13				0.793				
PI14				0.507				
PI15				0.746				
PI16				0.701				
PI2				0.707				
PI3				0.835				
PI4				0.859				
PI5				0.870				
PI6				0.837				
PI7				0.814				

PI8				0.790				
PI9				0.868				
PTK1					0.707			
PTK2					0.872			
PTK3					0.471			
PTK4					0.814			
PTK5					0.907			
PTK6					0.611			
PTK7					0.889			
WBS1						0.824		
WBS2						0.811		
WBS3						0.910		
WBS4						0.640		
WBS5						0.445		
WBS6						0.870		
WBS7						0.793		
WBS8						0.879		
WBS9						0.406		
KI x PI							1.000	
KP x PI								1.000

Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
GG	0.959	0.966	0.965	0.651
KI	0.888	0.920	0.918	0.627
KP	0.955	0.962	0.961	0.625
PI	0.954	0.961	0.959	0.599
PTK	0.876	0.907	0.907	0.590
WBS	0.894	0.925	0.917	0.566

Lampiran 6: Nilai R-Square

	R-square	R-square adjusted
PTK	0.855	0.849

Lampiran 7: Pengujian Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
GG -> PTK	-0.044	-0.062	0.168	0.265	0.791
KI -> PTK	-0.195	-0.209	0.142	1.374	0.169
KP -> PTK	0.068	0.080	0.093	0.732	0.464
PI -> PTK	0.949	0.921	0.256	3.708	0.000
WBS -> PTK	0.279	0.265	0.143	1.942	0.052
KI x PI -> PTK	-0.165	-0.166	0.083	1.986	0.047
KP x PI -> PTK	0.263	0.233	0.115	2.289	0.022